

**PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM
PENGEMBANGAN PARIWISATA TELAGA NGEBEL KABUPATEN
PONOROGO**

Zahrotul Ulfiiyah Ridlo, Sri Suwitra

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Ngebel Lake Tourism is a leading tourism destination in Ponorogo Regency that has a high attraction for tourists. The number of visits shows a significant increase every year and is recorded as higher than other tourist attractions, while tourism is the largest contributor to Regional Original Income (PAD) from the tourism sector. Therefore, the Department of Culture, Tourism, Youth, and Sports of Ponorogo Regency (DISBUDPARPORA) has a very crucial role as an important actor in the development of Ngebel Lake tourism. The purpose of this study is to describe and analyze the role of DISBUDPARPORA in developing the leading tourism destination of Ngebel Lake and describe and analyze what aspects are supporting and inhibiting in the development of Ngebel Lake tourism. This study uses a qualitative method with descriptive analysis and accompanied by relevant supporting evidence. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation studies. The study was conducted at DISBUDPARPORA Ponorogo Regency. The results of this study indicate that DISBUDPARPORA Ponorogo Regency has developed Ngebel Lake tourism through various aspects including, technical policy formulation, policy implementation, community empowerment, destination governance and the tourism industry. Supporting factors in the role of DISBUDPARPORA are the involvement of MSMEs in various festival activities, MSME actors are involved in tourism activities and are given training to become tour guides, cooperation between stakeholders across OPDs. Inhibiting factors in the role of DISBUDPARPORA include community participation that is not yet fully optimal, budget limitations, the absence of a special place to accommodate local MSME products around tourist areas, the absence of a Tourism Information Center (TIC).

Keywords: *Role of Government, Development, Sustainable Tourism*

ABSTRAK

Pariwisata Telaga Ngebel merupakan pariwisata unggulan yang ada di Kabupaten Ponorogo yang memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan. Jumlah kunjungan menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya dan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan objek wisata lainnya, sekaligus pariwisata tersebut menjadi penyumbang PAD terbesar dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo (DISBUDPARPORA) memiliki peran yang sangat krusial sebagai aktor penting dalam pengembangan pariwisata Telaga Ngebel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran DISBUDPARPORA dalam mengembangkan pariwisata unggulan Telaga Ngebel serta mendeskripsikan dan menganalisis aspek apa yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pengembangan pariwisata Telaga Ngebel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan disertai bukti-bukti pendukung yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan di DISBUDPARPORA Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DISBUDPARPORA Kabupaten Ponorogo telah melakukan pengembangan pariwisata Telaga Ngebel melalui berbagai aspek meliputi, perumusan kebijakan teknis, pelaksana kebijakan, pemberdayaan masyarakat, tata kelola destinasi dan industri pariwisata. Faktor pendukung dalam peran DISBUDPARPORA adalah keterlibatan UMKM dalam berbagai kegiatan festival, pelaku UMKM terlibat dalam kegiatan wisata dan diberikan pelatihan menjadi pemandu wisata (*tour guide*), kerjasama antar *stakeholders* lintas OPD. Faktor penghambat peran DISBUDPARPORA meliputi partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal, keterbatasan anggaran, belum terdapat tempat khusus untuk menampung produk lokal UMKM di sekitar kawasan wisata, belum tersedia *Tourism Information Center* (TIC).

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengembangan, Pariwisata berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi sektor utama dalam pembangunan ekonomi global dan nasional. Sebagai industri yang mengalami pertumbuhan pesat, pariwisata memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pengembangan ekonomi kreatif di berbagai sektor pendukung seperti perhotelan, kuliner, transportasi, dan jasa lainnya (Hidayat & Djadjuli, 2020).

Sektor ini juga menjadi salah satu kontributor utama dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 3,9%, dengan nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp1.414,77 triliun, menunjukkan bahwa sektor ini telah pulih sebesar 82,79% dibandingkan tahun 2019 dan pada tahun 2024 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB mencapai 4% atau meningkat dibandingkan 2023 sebesar 3,9% dan sektor pariwisata juga dapat memperluas kesempatan kerja di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah yang memiliki potensi wisata alam dan budaya yang kuat (Tui *et al.*, 2023).

Agenda pembangunan dan Program Aksi Nasional Tahun 2020–2024 menekankan penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Salah

satu poin utama dalam agenda ini adalah meningkatkan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan infrastruktur dan citra destinasi wisata (Perpres No. 59 Tahun 2017). Program ini menegaskan bahwa pengelolaan pariwisata harus berbasis keberlanjutan dan inklusif, dengan mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam setiap tahap pengembangannya.

Pariwisata menjadi sektor favorit di negara berkembang karena kemampuannya dalam menciptakan efek ganda (*multiplier effect*). Dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2020-2024.

Kabupaten Ponorogo, terletak di Jawa Timur, memiliki potensi wisata yang signifikan terutama dalam sektor alam, budaya, dan religi. Salah satu ikon budaya yang telah dikenal luas adalah kesenian Reog Ponorogo, yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Sektor pariwisata telah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian lokal di Ponorogo. Kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tergolong signifikan, mengingat tingginya kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan

ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata itu sendiri, tetapi juga ikut mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti kuliner, penginapan, transportasi, dan produk kerajinan lokal.

Tabel 1. Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

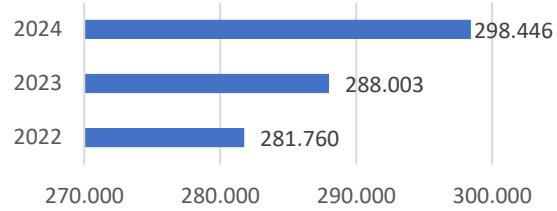
Daya Tarik Wisata	Jumlah Kunjungan Tahun 2024
Telaga Ngebel	298.466
Taman Wisata Ngembang	10.410
Makam Batoro Katong	40.881
Makam Kyai Ageng M. Besari & Tegalsari	85.157
Makam Astana Strandil	12.801
Goa Lowo	404
Situs Watu Dukun	448
Makam Tumenggung Djajengrono	0
Makam Tumenggung Brotonegoro	352
Mloko Sewu	0
Ngebel Adventure Park	169
Sendang Bulus	41.190
Brilliant Water Park	145.912
Air Terjun Pletuk	0
Air Panas Tirta Husada	53.753
Gunung Beruk	0
Air Terjun Coban Lawe	0
Tubing Mendak	438
Kampung Durian	2.300
Air Terjun Jurang Gandul	3.737
Kolam Renang Tirta Menggolo	8.395
Sumorobangun Flowers Bitung	9.284
Bukit Soeharto	56.357

Sumber: Disbudparpora Kabupaten Ponorogo (2024)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa Telaga Ngebel merupakan destinasi wisata dengan jumlah kunjungan tertinggi pada tahun 2024, yaitu sebanyak 298.466 wisatawan. Angka ini menunjukkan bahwa Telaga Ngebel masih menjadi daya tarik utama pariwisata di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, destinasi seperti Brilliant Water Park dan Makam Kyai Ageng M. Besari & Tegalsari juga mencatat jumlah kunjungan yang cukup tinggi, masing-masing mencapai 145.912

wisatawan dan 85.157 wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa selain wisata alam, wisata religi juga memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan jumlah wisatawan di Ponorogo.

Jumlah Kunjungan Wisatawan Telaga Ngebel Tahun 2022-2024



Gambar 1. Kunjungan Wisatawan Telaga Ngebel Tahun 2022-2024

Sumber: Disbudparpora Kabupaten Ponorogo (2024)

Grafik diatas menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan ke Telaga Ngebel selama periode 2022 hingga 2024, terlihat adanya pola pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2022 jumlah pengunjung tercatat sebanyak 281.760 orang, kemudian mengalami peningkatan menjadi 288.003 orang pada tahun 2023. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, dengan jumlah wisatawan yang mencapai 298.446 orang, menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan gambaran uraian mengenai situasi, kondisi permasalahan, serta berbagai temuan penelitian yang telah

diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo.”

KAJIAN TEORI

a. Peran Pemerintah

Menurut Mathis (2008), terdapat tiga kategori utama peran aktor dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata, yaitu:

1. Pembuat kebijakan, yakni pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun regulasi dan kebijakan strategis yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.
2. Fasilitator, yaitu pihak yang menyediakan bantuan dan sumber daya yang diperlukan oleh masyarakat lokal untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan pariwisata.
3. Pelaksana dan pengelola, yakni aktor yang terlibat langsung dalam operasionalisasi serta pengelolaan kawasan wisata untuk memastikan pengembangan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Pengembangan Pariwisata

Menurut Yoeti, (2008), pengembangan sektor pariwisata harus berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamnetal sebagai berikut:

1. Keberlanjutan lingkungan, yaitu upaya pengembangan yang tetap menjaga kelestarian daya tarik wisata secara ekologis.
2. Keberlanjutan sosial dan budaya, di mana pengembangan pariwisata mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan serta budaya lokal.
3. Keberlanjutan ekonomi, yaitu menjamin agar aktivitas pariwisata mampu mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, artinya pariwisata harus memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk berkontribusi dan memperoleh manfaat langsung dari aktivitas wisata di wilayahnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan pengembangan kawasan pariwisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo. Situs penelitian dilakukan pada DISBUDPARPORA Kabupaten Ponorogo dan kawasan pariwisata Telaga Ngebel.

Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari Kepala Bidang Destinasi dan Industri

Pariwisata, Sub Koordinator Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pendamping Ekosistem Pariwisata Telaga Ngebel, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Pendamping UMKM di Kawasan Pariwisata Telaga Ngebel dan Pengunjung wisatawan di Sekitar Kawasan Pariwisata Telaga Ngebel

Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan menggunakan berbagai bentuk data deskriptif yang bersifat naratif. Data yang dikumpulkan berupa informasi verbal, rekaman observasi lapangan, serta dokumen pendukung yang relevan. Sumber primer diperoleh melalui proses wawancara mendalam dengan informan kunci, serta sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, situs internet, dan sumber lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dilengkapi dengan analisis domain. Kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo

Peran DISBUDPARPORA adalah tugas dan fungsi yang harus dilakukan sebagai instansi yang memiliki bagian penting dalam pengembangan kawasan pariwisata Telaga Ngebel.

1. Perumusan Kebijakan Teknis

Perumusan kebijakan teknis yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo berlandaskan pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARD) yang berfungsi sebagai dokumen strategis dan pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan pariwisata daerah. RIPPARD menjadi acuan normatif sekaligus operasional dalam memastikan bahwa kebijakan yang disusun selaras dengan visi pembangunan daerah serta berorientasi pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan kebijakan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo menerapkan pendekatan partisipatif melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik

dari unsur internal Pemerintah Kabupaten Ponorogo maupun dari lembaga vertikal yang memiliki keterkaitan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya pariwisata. Keterlibatan instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Perhutani, serta Kementerian Pekerjaan Umum yang diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan aspek perencanaan berbasis data, pengelolaan kawasan hutan, serta pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air dalam perumusan kebijakan pariwisata daerah.

Melalui mekanisme FGD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupaya menghimpun masukan, pandangan, serta kepentingan dari berbagai pihak guna menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap kondisi serta potensi daerah. Dengan demikian, proses perumusan kebijakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi perspektif dan kebutuhan pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan pariwisata Kabupaten Ponorogo secara berkelanjutan.

2. Pelaksana Kebijakan

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo telah

mengimplementasikan serangkaian kebijakan pengembangan pariwisata yang berorientasi pada peningkatan kualitas destinasi melalui pembangunan dan penataan infrastruktur pariwisata. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat daya tarik destinasi unggulan daerah, khususnya di kawasan Telaga Ngebel, sebagai pusat pengembangan pariwisata berbasis alam dan rekreasi.



Gambar 2. Air Mancur Menari (*Water Fountain*) di Telaga Ngebel

Sumber: Data Sekunder Peneliti, (2025)

Salah satu program strategis yang berhasil direalisasikan adalah pembangunan fasilitas air mancur menari (*water fountain*) yang berfungsi sebagai atraksi wisata baru, disertai dengan pembangunan tribun di sekitar area air mancur sebagai sarana pendukung kenyamanan pengunjung. Selain pembangunan fisik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melaksanakan program pendampingan ekosistem pariwisata yang mencakup penguatan peran pelaku usaha lokal, peningkatan kualitas layanan

pariwisata, serta penataan lingkungan destinasi secara terpadu. Program-program tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan aspek infrastruktur, atraksi, dan kelembagaan dalam pengembangan pariwisata daerah.

Implementasi kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Ponorogo. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, meningkatnya tingkat kepuasan pengunjung, serta tumbuhnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti penginapan dan rumah makan di sekitar kawasan Telaga Ngebel. Dampak ekonomi yang ditimbulkan menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata telah berkontribusi terhadap penguatan aktivitas ekonomi lokal dan peningkatan peluang usaha bagi masyarakat di sekitar destinasi.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu fokus strategis dalam pelaksanaan program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo, khususnya dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh dinas, masyarakat lokal

didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah serta memperkuat kapasitas usaha yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata.

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas produk lokal, seperti produksi gula aren dan kopi pupus, melalui pengenalan inovasi kemasan yang lebih modern dan menarik, serta penerapan strategi pemasaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya sistematis dari pemerintah daerah untuk tidak hanya meningkatkan kualitas produksi, tetapi juga memperluas jangkauan pasar dan daya saing produk lokal di tengah dinamika industri pariwisata dan ekonomi kreatif.



Gambar 3. Pendampingan Desa Wisata Pupus

Sumber: Data Sekunder Peneliti, (2025)

Dampak dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tersebut tercermin pada tumbuhnya berbagai jenis

usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Usaha-usaha tersebut meliputi pedagang kaki lima, rumah makan, penginapan, hingga penyedia jasa wisata seperti penyewaan perahu. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemberdayaan yang dijalankan telah mampu mendorong munculnya aktivitas ekonomi baru serta memperkuat keterkaitan antara sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Secara keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata daerah. Pemberdayaan tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat keberlanjutan sektor pariwisata melalui keterlibatan aktif dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pengelolaan destinasi wisata.

3. Tata Kelola Destinasi

Ditinjau dari aspek tata kelola destinasi, pengelolaan kawasan wisata Telaga Ngebel masih menghadapi sejumlah kendala struktural yang memerlukan perhatian

serius dari pemangku kepentingan terkait. Salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan kapasitas lahan parkir, yang belum mampu mengakomodasi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, terutama pada periode puncak seperti musim liburan dan akhir pekan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung serta mengganggu kelancaran aktivitas wisata di kawasan destinasi. Keterbatasan infrastruktur parkir juga mengindikasikan adanya kebutuhan untuk melakukan penataan ruang dan perencanaan fasilitas pendukung yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan pola kunjungan wisatawan.

Di sisi lain, pengelolaan kebersihan kawasan wisata Telaga Ngebel menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Upaya penataan dan pemeliharaan kebersihan kawasan telah mengalami peningkatan yang signifikan apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek manajerial serta meningkatnya kesadaran pihak pengelola dan masyarakat terhadap pentingnya kebersihan sebagai salah satu faktor penentu kualitas destinasi wisata dan kepuasan pengunjung.

Meskipun pengelolaan Telaga Ngebel telah menunjukkan kemajuan pada aspek

kebersihan lingkungan, masih diperlukan upaya penguatan tata kelola destinasi secara menyeluruh, khususnya dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur pendukung seperti fasilitas parkir.

4. Industri Pariwisata

Pada aspek pengembangan industri pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo menunjukkan peran yang cukup aktif dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi destinasi wisata daerah. Upaya promosi tersebut dilakukan melalui berbagai platform media digital, seperti Instagram, situs web resmi yang dikelola oleh DISBUDPARPORA, serta TikTok. Melalui media tersebut, informasi mengenai potensi pariwisata daerah disajikan dan diperbarui secara berkala, sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menyesuaikan dengan pola perilaku wisatawan yang semakin bergantung pada informasi digital dalam menentukan tujuan wisata.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan pariwisata juga tercermin pada keberhasilan Desa Wisata Pupus, yang berperan sebagai salah satu desa penunjang kawasan wisata Telaga Ngebel. Dalam ajang Festival Dewi Cemara 2025, Desa Wisata Pupus berhasil meraih dua penghargaan, yaitu kategori *Virtual Tour*

Terbaik dan *Virtual Tour Eksotis*. Prestasi tersebut tidak hanya menunjukkan kemampuan desa dalam mengemas potensi wisata secara kreatif berbasis teknologi digital, tetapi juga mencerminkan efektivitas strategi promosi yang mengintegrasikan inovasi digital dengan kearifan lokal.



Gambar 4. Penghargaan Desa Pupus dalam Ajang Festival Dewi Cemara 2025

Sumber: Data Sekunder Peneliti, (2025)

Keberhasilan tersebut menjadi indikator adanya kolaborasi yang sinergis antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo dengan masyarakat dan komunitas lokal dalam mengembangkan potensi wisata berbasis digital. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa pengembangan industri pariwisata

tidak semata-mata bergantung pada peran pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses inovasi dan promosi destinasi.

Selain kegiatan promosi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berupaya memperkuat daya saing pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kerja sama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan dalam pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Fasilitasi legalitas ini menjadi langkah strategis dalam mendorong perluasan akses pasar produk lokal, sehingga tidak hanya dipasarkan di tingkat lokal, tetapi juga berpotensi menembus pasar di luar daerah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Pengembangan Pariwisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo

Pelaksanaan peran DISBUDPARPORA dalam pengembangan pariwisata tentunya tidak bisa terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhinya, baik faktor pendukung maupun penghambat. Dalam hal ini, faktor-

faktor tersebut dapat dilihat dari bagaimana DISBUDPARPORA Kabupaten Ponorogo melaksanakan perannya, yang diklasifikasikan menjadi beberapa peran utama, yaitu peran regulator, fasilitator, dan pelaksana (*implementor*)

1. Peran Regulator

Peran pemerintah daerah sebagai regulator pariwisata berfungsi sebagai penentu arah kebijakan dan pengendali tata kelola sumber daya, sehingga setiap aktivitas wisata dapat berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal (Tui *et al.*, 2023).

a. Perumusan Kebijakan dan Regulasi

Perumusan kebijakan dan regulasi pengelolaan pariwisata di kawasan Telaga Ngebel dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo dengan berlandaskan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPKD) sebagai dokumen perencanaan strategis. RIPKD berfungsi sebagai acuan normatif dalam menentukan arah, prioritas, dan keselarasan kebijakan pariwisata dengan visi pembangunan daerah, sekaligus menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan kepariwisataan.

Kebijakan pengelolaan pariwisata Telaga Ngebel diarahkan pada penerapan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan menekankan

keterlibatan aktif masyarakat lokal. Penerapan konsep *Community Based Tourism* (CBT) diwujudkan melalui penguatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai mitra strategis pemerintah, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan destinasi wisata.

b. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan aturan dalam pengelolaan kawasan wisata Telaga Ngebel dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo melalui mekanisme yang bersifat administratif, operasional, dan partisipatif. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi rutin terhadap kinerja petugas lapangan dan pelaksanaan kegiatan wisata, yang difasilitasi dalam bentuk rapat koordinasi berkala. Evaluasi ini difokuskan pada aspek operasional utama, seperti kebersihan lingkungan, penataan pedagang, serta keteraturan aktivitas wisatawan di ruang publik.

2. Peran Fasilitator

Peran fasilitator ini menekankan fungsi Dinas sebagai pihak yang menyediakan dukungan, membuka akses, dan menciptakan ruang partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan kepariwisataan.

Menurut Ife (2013) Peran fasilitator pemerintah daerah dalam pembangunan berbasis masyarakat bukan sekadar menyediakan bantuan material, tetapi menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat mengembangkan kapasitas dan mengambil keputusan secara mandiri.

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung di kawasan wisata Telaga Ngebel merupakan aspek strategis dalam pengembangan destinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo secara bertahap dan berkelanjutan.

Keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam penyediaan dan pemerataan fasilitas, khususnya fasilitas parkir. Dari aspek kebersihan dan sanitasi, penyediaan tempat sampah dan toilet umum telah mengalami perbaikan dan dinilai cukup memadai oleh wisatawan. Namun demikian, pemerataan fasilitas kebersihan dan penambahan unit toilet di beberapa titik strategis masih menjadi kebutuhan prioritas, terutama pada periode kunjungan wisata yang tinggi.

Dalam hal penyediaan pusat informasi wisata, kawasan Telaga Ngebel hingga saat ini belum memiliki Tourism Information Center (TIC) resmi, meskipun keberadaannya sangat dibutuhkan oleh wisatawan dan pelaku wisata lokal.

Ketiadaan TIC membatasi akses informasi terpadu bagi pengunjung, terutama wisatawan dari luar daerah, serta menghambat promosi potensi wisata pendukung di sekitar kawasan telaga. Selain itu, sistem pembelian tiket yang masih bersifat manual dinilai kurang efisien dan belum responsif terhadap perkembangan teknologi, sehingga pengembangan layanan tiket daring menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

b. Akselerasi Sumber Daya

Kebijakan penguatan SDM diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat lokal melalui pembinaan Pokdarwis, penguatan peran BUMDes, serta pendampingan pelaku UMKM agar mampu berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal. Pembinaan Pokdarwis dilakukan secara berkelanjutan melalui forum diskusi dan rapat koordinasi rutin yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pedagang, pengelola jasa wisata, dan pelaku usaha pendukung.

Pengembangan SDM juga diperkuat melalui kolaborasi lintas kelembagaan, khususnya antara Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dalam membina BUMDes

sebagai pengelola usaha wisata di tingkat desa.

Dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, Dinas Pariwisata memberikan fasilitasi kepada UMKM lokal melalui penyediaan ruang pemasaran, seperti pemberian stand gratis pada event wisata dan festival. Upaya ini memperluas akses pasar bagi produk lokal sekaligus meningkatkan eksposur UMKM terhadap wisatawan.



Gambar 5. Pemasaran Produk UMKM Pada Stand Bazar

Sumber: Data sekunder Peneliti, (2025)

Meskipun berbagai program pengembangan SDM telah dilaksanakan, namun masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi partisipasi masyarakat. Rendahnya kesadaran awal dan keterbatasan kesiapan SDM menjadi hambatan utama, terutama bagi masyarakat

yang belum merasakan manfaat langsung dari kegiatan pariwisata.



Gambar 6. Pelibatan Kunjungan Wisatawan dalam Proses Produksi Gula Aren

Sumber: Data Sekunder Peneliti, (2025)

Inovasi pengembangan SDM juga diwujudkan melalui penerapan konsep wisata edukatif berbasis UMKM dan kearifan lokal. Pengunjung dilibatkan dalam proses produksi sebagai bagian dari atraksi wisata, sehingga wisatawan tidak hanya mengonsumsi produk, tetapi juga memperoleh pengalaman edukatif. Pendekatan ini memperkuat penerapan konsep *community-based tourism* dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan pariwisata.

3. Peran Pelaksana (*Implementor*)

Peran pelaksana yaitu aktor yang terlibat langsung dalam operasionalisasi serta pengelolaan kawasan wisata untuk memastikan pengembangan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

a. Pengelola Operasional harian Destinasi

Operasional teknis di lapangan dikoordinasikan melalui bidang destinasi pariwisata, yang mencakup pengawasan kebersihan, keamanan, penataan pedagang, serta pengelolaan aktivitas wisata secara menyeluruh. Mengingat kompleksitas kawasan yang mencakup area permukiman, pasar, dan fasilitas publik, pengelolaan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Peran Dinas tidak bersifat tunggal, melainkan lebih menekankan pada fungsi koordinatif dan fasilitatif. Pelaksanaan operasional harian didukung oleh penunjukan koordinator lapangan dari unsur aparatur dinas yang berdomisili di kawasan Ngebel, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif terhadap permasalahan teknis di lapangan. Partisipasi masyarakat lokal menjadi elemen kunci dalam pengelolaan operasional harian. Sebagian besar tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan operasional berasal dari masyarakat setempat, yang berperan dalam pengelolaan parkir, kebersihan, keamanan, dan fasilitas publik.

Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga memiliki posisi strategis

dalam mendukung pengelolaan wisata berbasis masyarakat, meskipun masih menghadapi kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia

b. Koordinator Lapangan Multipihak

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo berperan sebagai aktor utama dan koordinator sentral, sementara dinas teknis lain seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan menjalankan fungsi sektoral yang saling melengkapi, khususnya dalam aspek infrastruktur, kebersihan lingkungan, dan keselamatan transportasi wisata. Selain unsur pemerintah, masyarakat lokal memiliki peran strategis melalui keberadaan paguyuban pelaku usaha pariwisata, Pokdarwis, dan BUMDes.

Koordinasi lintas sektor di kawasan Telaga Ngebel berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya mendukung kelancaran operasional destinasi wisata, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal serta penguatan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan kawasan wisata.

KESIMPULAN

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo memiliki peran strategis sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata kawasan Telaga Ngebel. Peran tersebut dijalankan berdasarkan kerangka regulatif yang jelas, yakni Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 150 Tahun 2021, serta berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARD). Dalam pelaksanaannya, dinas tidak hanya berfungsi sebagai perumus kebijakan teknis, tetapi juga sebagai koordinator lintas sektor yang mengintegrasikan kepentingan berbagai instansi dan pemangku kepentingan melalui mekanisme partisipatif, seperti Focus Group Discussion (FGD).

Pada aspek implementasi kebijakan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menunjukkan kinerja yang relatif efektif melalui pembangunan dan penataan infrastruktur destinasi, antara lain pembangunan air mancur menari, tribun wisata, serta pendampingan ekosistem pariwisata. Kebijakan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, perbaikan kualitas pengalaman wisata, serta pertumbuhan usaha pendukung pariwisata di sekitar Telaga Ngebel. Meskipun demikian,

penguatan aspek keberlanjutan dan pemerataan manfaat ekonomi masih menjadi agenda yang perlu dioptimalkan.

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar utama pengembangan pariwisata Telaga Ngebel. Dinas secara aktif memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM, khususnya dalam peningkatan kualitas produk, inovasi kemasan, serta strategi pemasaran berbasis digital. Upaya ini berkontribusi terhadap tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal dan memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku utama dalam industri pariwisata. Di sisi lain, tata kelola destinasi masih menghadapi kendala struktural, terutama keterbatasan lahan parkir pada periode kunjungan puncak, meskipun pengelolaan kebersihan kawasan menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Dalam pengembangan industri pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah memanfaatkan teknologi digital secara progresif melalui promosi berbasis media sosial dan platform daring. Keberhasilan Desa Wisata Pupus dalam ajang Festival Dewi Cemara 2025 menjadi indikator nyata efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal dalam

mengembangkan pariwisata berbasis teknologi digital. Selain itu, dukungan terhadap legalitas usaha UMKM melalui fasilitasi perizinan memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

2. Faktor pendukung pengembangan pariwisata Telaga Ngebel meliputi tingginya partisipasi pelaku UMKM, pelaksanaan wisata edukatif, kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah, serta peningkatan kapasitas pelaku wisata melalui pelatihan pemandu wisata. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan infrastruktur pendukung seperti ketiadaan Tourism Information Center (TIC), sistem tiket yang masih manual, rendahnya adopsi digitalisasi layanan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kendala permodalan dan ruang usaha bagi sebagian UMKM.

SARAN

1. Penyediaan fasilitas publik tambahan seperti toilet umum, tempat istirahat, serta penerangan di area wisata untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan wisatawan.
2. Membentuk Tourism Information Center (TIC) yang berfungsi sebagai pusat layanan informasi wisata secara terpadu.

3. Menerapkan sistem digitalisasi dalam layanan pariwisata seperti penerapan sistem pemesanan tiket secara daring dan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS.
4. Pelaksanaan pelatihan dijadwalkan secara lebih fleksibel agar dapat diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa mengganggu aktivitas.
5. Perlu kolaborasi (*Public-Private Partnership*) khususnya dalam pengembangan infrastruktur wisata, promosi, dan event budaya.
6. Bantuan kemudahan akses permodalan dan penyediaan ruang usaha yang representatif bagi pelaku UMKM

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, F. Y., & Fauzi, A. M. (2021). Peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Pakuncen. *Paradigma*, 10(1).
- Alvianita, V., Subowo, A., & Santoso, R. S. (2024). Peran Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(4), 424–439.
- Basheka, B. C. (2012). The paradigms of public administration re-examined: A reflection. *Journal of Public Administration*, 47(1), 25–67.
- Cortright, C. E., McCann, W., Willits, D., Hemmens, C., & Stohr, M. K. (2020). An analysis of state statutes regarding the role of law enforcement. *Criminal Justice Policy Review*, 31(1), 103–132.
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132–153. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.18>
- Dredge, D. (2013). Development, economy and culture: Cultural heritage tourism planning, Liangzhu, China. In *Cultural and heritage tourism in Asia and the Pacific* (pp. 232–249). Routledge.
- Fifiyanti, D., & Damanik, J. (2021). Pemetaan Peran Dan Kontribusi Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Ekowisata Desa Burai. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 448. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.36893>
- Giantari, K. I. G. A., & Barreto, M. (2019). Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas di Desa Marobo, Kabupaten Babonaro, Timor Leste. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11, 783. <https://media.neliti.com/media/publications/44781-ID-strategi-pengembangan-objek-wisata-air-panas-di-desa-marobo-kabupaten-babonaro-t.pdf>
- Gulick, L., & Urwick, L. (2004). *Papers on the Science of Administration*. Routledge.
- Henry, N. (2015). *Public administration and public affairs*. Routledge.
- Hidayat, E. S., & Djadjuli, R. D. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 277–

293.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3643>
- Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Edisi 3. *Yogyakarta: Gava Media*.
- Kedasi Silayar, Ika Sartika, D. M. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif. *Renaissance*, 6(02), 859–874.
- Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Marliani, L. (2019). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 17–21.
- Mathis, R. L. (2008). *Human resource management twelfth edition*. Thomson South-Western.
- Nugroho, R. (2014). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kinerja Kebijakan. *Edisi Kelima, Revisi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Penerbit Alfabeta.
- Peters, B. G. (2018). *The politics of bureaucracy: An introduction to comparative public administration*. Routledge.
- Pitana, & Gayatri. (2005). *Sosiologi Pariwisata*.
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Andi Offset.
- Pramesti, R., Kismartini, & Suwitri, S. (2024). Peran Aktor dalam Pengembangan Wisata Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 310–328.
- Rachmad, Y. E., Rijal, S., Niswaty, R., & Akib, H. (2021). *Pengantar Pariwisata*.
- Satibi, I. (2023). *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*. Unpas Press.
- Simon, H. A. (2018). The proverbs of administration. In *Democracy, bureaucracy, and the study of administration* (pp. 38–59). Routledge.
- Soekanto, S. (2002). *Teori peranan*. Jakarta: *Bumi Aksara*, 441.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Susi Iswanti, S. I., & Zulkarnaini, Z. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92–103. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9307](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9307)
- Thoha, M. (2017). *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Kencana.
- Tui, F. P., Ilato, R., Isa, R., & Abdussamad, J. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), 332–342. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.682>
- Wilson, W. (1887). The Study of Administration. *Political Science Quarterly*, 2(2), 197–222. <https://doi.org/10.2307/2139277>